PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019)

SKRIPSI

Nama : Sri Puspita Rahayu

NIM : 222017112

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019)

Di Ajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Sri Puspita Rahayu

NIM : 222017112

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Sri Puspita Rahayu
NIM	:	222017112
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	:	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama penggarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 23 Februari 2022

METERAI TEMPEL

4158AJX698925849

pita Rahayu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019)
Nama	: Sri Puspita Rahayu
NIM	: 222017112
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si	**Muhammad Fahmi, S.E., M.Si**
NIDN/NBM : 0206046303/784021	**NIDN/NBM: 0029097804/1197277**

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ***Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu".***
- ***"Maka Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan" (Qs. Al-Insyirah: 5)***

Jangan pernah melupakan Bismillah disetiap awalan kegiatanmu,

dan akhiri semua dengan Alhamdulillah

(Sri Puspita Rahayu)

Dengan Keridhoan Allah SWT,

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Bapakku (Suwarno) Mamakku (Asiyah) yang tercinta***
- ***Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Drs.Sunardi, S.E.,M.Si dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si***
- ***Mbakku (Nisa Kumalasari dan Tuti Maysaroh)***
- ***Adikku (Fathurrahman Wahyudi)***
- ***Almamaterku***

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil'alaamiin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada keluarganya, Sahabatnya dan kita selaku umatnya. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2019)"**. Skripsi ini diajukan oleh penulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Bapakku Suwarno dan Mamakku Asiyah, dan seluruh keluarga yang telah mendoa'kan, membantu dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E.,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA, dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Mbakku Nisa Kumalasari S.si, Tuti Maysaroh S.Pd ,Adikku Fathurrahman Wahyudi serta keponakan-keponakanku Muhammad Habibi Al-Fatih dan Ummu Ummaroh Agnis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a.
6. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2017 yang tetap jadi yang terbaik dan selalu memberikan dukungan,semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang sudah diberikan baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian,semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin Allahuma Aamiin.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2022
Penulis

Sri Puspita Rahayu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN PRAKATA vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK… xiv
ABSTRACT xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori 13
1. Teori Umum 13
a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 13
2. Belanja Modal 14
a. Pengertian Belanja Modal 14
b. Jenis-Jenis Belanja Modal 15
3. Kinerja Keuangan Daerah 17

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah 17
b. Kinerja Keuangan Daerah 17
c. Pengelolaan Keuangan Daerah 18
d. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah..... 18
e. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah..... 19
f. Pengukuran Kinerja Keuangan 19
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 21
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 21
B. Keterkaitan Antar Variabel 29
C. Kerangka Pemikiran..... 32
D. Hipotesis..... 32
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 33
B. Lokasi Penelitian..... 34
C. Operasional Variabel..... 34
D. Populasi dan Sampling..... 35
E. Data Yang Diperlukan..... 37
F. Metode Pengumpulan Data 39
G. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 46
1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 46
a. Sejarah Berdirinya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 46

b. Visi dan Misi 47
c. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 48
d. Fungsi 48
2. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan 49
a. Sejarah dan Tata Letak Geografis Daerah Provinsi Sumatera Selatan 49
b. Visi 50
c. Misi 50
B. Hasil Pengolahan Data 51
1. Hasil Statistik Deskriptif 51
2. Uji Asumsi Klasik 52
a. Hasil Uji Normalitas Data 53
b. Hasil Uji Multikolinearitas 55
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 56
d. Hasil Uji Autokorelasi 57
3. Hasil Uji Hipotesis 58
a. Hasil Uji Regresi Sederhana 58
b. Koefisien Determinasi 61
C. Pembahasan Hasil Penelitian 62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 66
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Total Aset, Belanja Modal Kab/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2018-2019 5

Tabel I.2 Kriteria Kinerja Efektivitas 7

Tabel I.3 Total Aset, Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Efektivitas) Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019..... 8

Tabel I.4 Total Aset, Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019..... 10

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya 28

Tabel III.1 Operasional Variabel..... 35

Tabel III.2 Populasi Daftar Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan..... 37

Tabel IV.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 52

Tabel IV.2 Uji Normalitas..... 54

Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinieritas 56

Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi..... 58

Tabel IV.5 Uji Regresi Linear Sederhana 59

Tabel IV.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 33

Gambar IV.1 Grafik Histogram 55

Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Data..... 55

Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fotocopy Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Pelatihan SPSS

Lampiran 5 Fotocopy Sertifkat yang dimiliki

Lampiran 6 Fotocopy Plagiarsm

Lampiran 7 Biodata Penulis

ABSTRAK

Sri Puspita Rahayu/222017112/2022/Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Terdapat tiga variabel digunakan yaitu Belanja Modal, Kinerja Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah. Populasi dan Sampel Penelitian adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak bepengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Sri Puspita Rahayu/222017112/2022/The Influence of Capital Expenditure on Regional Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable (Case Study in Regency/City in South Sumatra Province for the 2018-2019 Period).

The purpose of this study was to determine the effect of capital expenditure on regional financial performance with local revenue as an intervening variable. This type of research is associative research. There are three variables used, namely Capital Expenditure, Financial Performance and Regional Original Income. The population and research sample are 17 districts/cities in the province of South Sumatra in 2018-2019. The data used in this study is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data analysis technique used in this study was assisted by the Statistical Product and Service Solution (SPSS). The results of this study indicate that capital expenditure does not have a significant effect on regional financial performance, local revenue has a significant effect on regional financial performance. And capital expenditure has no significant effect on local revenue.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Financial Performance, and Regional Original Income

No	Nama	Nim	Keterangan
	Sri Puspita Rahayu	222017112	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting guna memperbaiki kesejahteraan warga Negara. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia (Sujarweni, 2015: 230). Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar (www.kompas.com).

Pemerintah memegang berbagai anggaran diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah).

Otonomi Daerah ini punya harapan baik bagi pemerintah daerah untuk menguji kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otoritas yang

menjadi hak daerah. Pemerintah Daerah mempunyai peluang dalamberkarya membangun daerahnya, tetapi dengan memperhatikan ketetapan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Bagian Ketiga Pasal 3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja pada suatu organisasi yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk memperkirakan masa lalu dengan melakukan berbagai ulasan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas atau mewakili kondisi pada suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah tersebut dalam hal pembiayaan penerapan otonomi daerah.

Menurut Kasmir (2012:7), Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui terjadinya kenaikan atau tidak dalam

kinerja keuangan maka dapat dilakukan kajian keuangan terlebih dahulu, selepas mendapati hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan baik atau buruk.

Menurut isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efesiensi dan ekonomis. Dari pernyataan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan memerhatikan efektivitas, efisensi dan ekonomis.

Kinerja keuangan hanya salah satu alat untuk mengukur bagaimana hasil pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi sesuai dengan prinsip *value for money* (efesien, efektif dan ekonomis). Analisis rasio keuangan memudahkan publik dalam menilai kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan selain itu juga dapat digunakansebagai pemerintah untuk membantu membuat strategi keuangan maupun non keuangan berfokus pada tujuan dan sasaran program yang pada akhirnya akan meningkatkan efesien dan efektifitas sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Aset tetap adalah syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang maupun badan usaha milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan disuatu daerah (Halim, 2014:169). Sedangkan menurut Mahmudi (Baldric, 2017:23) berpendapat bahwa penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki peran serta terhadap

pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Iim, Nunuy, Arie (2019) menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan Riko (2015) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sama hal dengan penelitian yang dilakukan Isti (2016) bahwa pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berpengaruh positif yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ni Luh, Wayan, I Wayan (2014) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Tabel I.1
Belanja Modal Kabupaten/Kota
Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2019

No	Kota/Kabupaten	Tahun	Belanja Modal
1.	Kab. OKU	2018	328.753.610.069
		2019	348.992.623.346
2.	Kab. OKI	2018	302.186.496.005
		2019	626.423.290.261
3.	Kab. Muara Enim	2018	556.628.833.664
		2019	888.469.027.757
4.	Kab. Lahat	2018	309.562.329.259
		2019	396.808.861.446
5.	Kab.Musi Rawas	2018	361.982.548.505
		2019	430.926.194.698
6.	Kab.Musi Banyuasin	2018	871.952.810.973
		2019	1.102.419.234.361
7.	Kab. Banyuasin	2018	266.429.179.609
		2019	424.906.574.189

8.	Kab. OKU Selatan	2018	311.605.526.136
		2019	381.552.391.906
9.	Kab. OKU Timur	2018	278.116.679.110
		2019	508.497.584.655
10.	Kab. Ogan Ilir	2018	275.666.163.928
		2019	323.235.226.236
11.	Kab. Empat Lawang	2018	248.436.146.175
		2019	253.146.607.390
12.	Kab. Pali	2018	622.813.258.526
		2019	764.119.060.810
13.	Kab. Musi Rawas Utara	2018	323.942.165.957
		2019	394.412.850.373
14.	Kota Palembang	2018	851.367.126.024
		2019	1.115.910.029.299
15.	Kota Prabumulih	2018	119.551.241.841
		2019	311.715.302.708
16.	Kota Pagar Alam	2018	92.576.062.279
		2019	216.250.532.961
17.	Kota Lubuk Linggau	2018	209.920.267.732
		2019	254.283.952.721

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2022

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan untuk menjadi tolak ukur dalam upaya meningkatkan kinerja, diantaranya kinerja keuangan pemda pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan pemda sangatlah penting, yang bertujuan membantu pemda menilai capaian suatu strategi atau evaluasi suatu program kegiatan melalui alat ukur finansial (Mahmudi, 2016).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa

rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD,Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi.

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh (Sudaryono et.al., 2017) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel I.2
Kriteria Efektivitas

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	>100	Sangat Efektif
2	90 – 100	Efektif
3	80 – 90	Cukup Efektif
4	60 – 80	Kurang Efektif
5	< 60	Tidak Efektif

Sumber: Sudaryono et.al., 2017

Untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3
Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Efektivitas)
Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019

Kab/Kota	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan Anggaran	Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Efektivitas)
Kab. OKU	2018	156.622.053.791	159.534.221.797	98,17
	2019	145.563.548.513	124.996.325.806	116,45
Kab. OKI	2018	235.946.143.259	356.429.244.700	66,20
	2019	195.401.652.978	190.197.170.951	102,74
Kab. Muara Enim	2018	232.468.708.585	171.691.413.937	135,40
	2019	303.296.321.152	227.483.295.226	133,33
Kab. Lahat	2018	112.571.296.475	121.765.768.419	92,45

	2019	141.161.144.250	111.165.768.419	126,98
Kab.Musi Rawas	2018	106.289.385.325	121.862.955.098	87,22
	2019	128.563.715.133	140.435.954.468	91,55
Kab.Musi Banyuasin	2018	210.238.037.284	212.733.644.000	98,83
	2019	286.594.847.516	287.089.026.502	99,83
Kab. Banyuasin	2018	140.602.072.490	110.633.838.345	127,09
	2019	200.616.348.310	137.051.490.200	146,38
Kab. OKU Selatan	2018	42.993.134.752	41.950.500.000	102,49
	2019	57.669.139.991	47.423.500.000	121,60
Kab. OKU Timur	2018	85.235.157.421	73.129.728.500	116,55
	2019	99.017.727.658	90.524.777.000	109,38
Kab. Ogan Ilir	2018	55.362.963.113	203.562.235.500	27,20
	2019	86.150.568.157	113.830.663.468	75,68
Kab. Empat Lawang	2018	32.217.492.489	42.061.237.157	76,60
	2019	41.672.141.481	52.348.231.630	79,61
Kab. Pali	2018	74.392.980.925	82.956.713.030	89,68
	2019	84.794.229.883	93.629.780.546	90,56
Kab. Musi Rawas Utara	2018	30.141.830.710	35.659.028.000	84,53
	2019	37.574.950.357	54.630.672.000	68,78
Kota Palembang	2018	953.302.082.628	1.055.615.406.565	90,31
	2019	1.081.114.690.868	1.652.647.400.000	65,42
Kota Prabumulih	2018	90.910.521.066	114.058.001.251	79,71
	2019	100.975.564.957	96.498.000.000	104,64
Kota Pagar Alam	2018	73.600.344.354	62.107.054.619	118,51
	2019	60.064.187.983	44.411.346.576	135,25
Kota Lubuk Linggau	2018	105.606.815.787	114.914.955.768	91,90
	2019	100.950.256.994	92.050.000.000	109,67

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel I.3 diatas rasio efektivitas terlihat bahwa secara keseluruhan efektivitas kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif dan cukup efektif, tetapi pada Kab. OI berada pada kriteria yang tidak efektif yaitu 27,20. Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif dan kurang efektif, namun pada Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Banyuasin

memiliki kriteria yang efektif yaitu 91,55 dan 99,83 ,Sedangkan pada Kab. Pali memiliki kriteria yang cukup efektif yaitu 90,56.

Rasio Efektivitas keuangan daerah memberikan perkiraan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari nilai target anggarannya. Rasio ini merupakan besar PAD yang terealisasi dibandingkan target anggarannya. Dengan demikian, rasio ini memberikan informasi sejauh mana upaya pemerintah daerah setempat memaksimalkan potensi PAD agar dapat terserap secara optimal.

Semakin tinggi Rasio Efektivitas berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Tabel I.4
Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019

No	Kota/Kabupaten	Tahun	PAD
1.	Kab. OKU	2018	156.622.053.791
		2019	145.563.548.513
2.	Kab. OKI	2018	235.946.143.259
		2019	195.401.652.978
3.	Kab. Muara Enim	2018	232.468.708.585
		2019	303.296.321.152
4.	Kab. Lahat	2018	112.571.296.475
		2019	141.161.144.250
5.	Kab.Musi Rawas	2018	106.289.385.325
		2019	128.563.715.133
6.	Kab.Musi Banyuasin	2018	210.238.037.284
		2019	286.594.847.516
7.	Kab. Banyuasin	2018	140.602.072.490

		2019	200.616.348.310
8.	Kab. OKU Selatan	2018	42.993.134.752
		2019	57.669.139.991
9.	Kab. OKU Timur	2018	85.235.157.421
		2019	99.017.727.658
10.	Kab. Ogan Ilir	2018	55.362.963.113
		2019	86.150.568.157
11.	Kab. Empat Lawang	2018	32.217.492.489
		2019	41.672.141.481
12.	Kab. Pali	2018	74.392.980.925
		2019	84.794.229.883
13.	Kab. Musi Rawas Utara	2018	30.141.830.710
		2019	37.574.950.357
14.	Kota Palembang	2018	953.302.082.628
		2019	1.081.114.690.868
15.	Kota Prabumulih	2018	90.910.521.066
		2019	100.975.564.957
16.	Kota Pagar Alam	2018	73.600.344.354
		2019	60.064.187.983
17.	Kota Lubuk Linggau	2018	105.606.815.787
		2019	100.950.256.994

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2022

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tetarik untuk meneliti kembali mengenai Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dengan judul : "**Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadapkinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening

2. Bagi Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah Sumatera Selatan.

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah

Astriani, Reni. 2020. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Darah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Palembang

Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Christian, Kalangi, Natalia, 2017. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern

Darwanis, Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Darah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 1, No.2

Larasati Yulia Putri, Hardi Utomo. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening*. Among Makarti

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. Jakarta: Andi Yogyakarta

Ni Putu Gina Skma Antari, Ida Bagus Panji Sedana, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*

Peraturan Pemerintah (PP), Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Riri Septyanigrum Putri, 2018. *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*

Sa'adah, Neilis. 2019. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*

V. Wiratna Sujarweni. 2015, *Metodologi Peneleitian Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta

V. Wiratna. 2015.*Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Azhar Iqlima. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa*

Juwita Rakhmini, 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*

Amrozi Imam Akhmad, 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*

Akhmad Zulkarnain, 2020. *Pengukuran Keuangan Pemerintah Kota Pontianak*

Diana Eva, 2019. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar*

Dr. Rudy, 2017. *Anggaran Pendaptan Asli Daerah (APBD)*

Ni Putu Ida, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Hastuti dwi, 2018. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar*

www.djpk.kemenkeu.go.id